

# Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

If you ally dependence such a referred **badan pemeriksa keuangan republik indonesia** books that will have enough money you worth, get the totally best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to hilarious books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are along with launched, from best seller to one of the most current released.

You may not be perplexed to enjoy all book collections **badan pemeriksa keuangan republik indonesia** that we will agreed offer. It is not approaching the costs. Its roughly what you obsession currently. This **badan pemeriksa keuangan republik indonesia**, as one of the most on the go sellers here will categorically be accompanied by the best options to review.

## **ANALISIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI PADA KANTOR ...**

SAPP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Melalui prosedur dan sistem inilah dana negara digunakan, dimanfaatkan, dan ... Pada tahun 2011, BKKBN memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi ...

## *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

## AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nama resmi UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 1999-2002. Sungguhpun UUD ini belum berapa lama ... VIII A BADAN

PEMERIKSA KEUANGAN 12. IX Kekuasaan Kehakiman IX TETAP 13. IXA WILAYAH NEGARA 14. X  
Warga Negara X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 15. XA HAK ...

#### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR ...**

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ; b.  
bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ... Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2.  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ...

#### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 ...**

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 13. Pasar Modal adalah kegiatan yang  
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan  
dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 14. Penasihat  
Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada

#### Faktor Penentu Audit Report Lag Pemerintah Daerah di ...

Faktor Penentu Audit Report Lag Pemerintah Daerah di Indonesia Aditya Kurniawan Wicaksono<sup>1</sup>,  
Sutaryo<sup>2</sup> 1,2, Universitas Sebelas Maret, 1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
1star.piet@gmail.com, 2sutaryo@staff.uns.ac.id Abstract This study aims to determine the effect of  
internal audit and the assistance of state

#### PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PENYAJIAN ...

keuangan masih banyak hal yang harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan dalam  
penyajian laporan keuangan yang ada. Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012

#### *STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA - BPK*

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ...

#### **UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK ...**

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

#### **BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24**

#### **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI...**

oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Sampai saat ini masih banyak permasalahan dan penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2013 Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Kota Dumai kembali lagi mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

#### **Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ...**

keuangan daerah, pada hal keuangan daerah ini merupakan obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Reformasi di bidang keuangan negara seperti terbitnya UU No. 17 Tahun 2003 dan undang-undang lainnya termasuk pengaturan sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah dilekatkan di dalam sistem keuangan negara. Reformasi di bidang ...

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) - Bandung**

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 22 tahun 2013 ... Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan 8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. 2).

#### **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

Pernyataan No 13 Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum . 241 ... pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan ... 33 pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 34 pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan

## **BAB II GAMBARAN UMUM A. Ombudsman 1. Pengertian ...**

masing-masing. Sebagai contoh, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang memeriksa penggunaan keuangan Negara, DPR dengan hak meminta keterangan dan hak mengajukan pertanyaan mempunyai kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Bahkan dalam perubahan kedua UUD 1945, fungsi pengawasan telah dipertegas

### *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN ...*

Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagai ke dalam enam pos, yaitu : 1. Belanja Jalan, Irigasi, dan lainnya 2. Belanja aset tetap lainnya 3. Belanja aset lainnya 4. Belanja Tanah 5. Belanja Mesin 6. Belanja Gedung dan Bangunan Temuan Audit (BPK) Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk

### **Kapal perikanan pelaku illegal fishing yang ditangani ...**

Polisi Perairan Kepolisian Republik Indonesia (Satpolair Polri), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Selang periode 2012-2020 jumlah kapal perikanan pelaku illegal fishing yang ditangkap oleh penegak hukum di laut adalah sebanyak 173 kapal. PSDKP KKP yang berkaitan

### *PENGARUH KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA DAN ...*

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan tanggapan atas kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dengan tingkatan tertentu yang dianggap berhubungan dengan kinerja pengelolaan keuangan, akan tetapi seringkali kita kurang memahami mengapa suatu laporan keuangan

## **BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian**

Fenomena secara khusus dalam penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari TA 2012-2015 atas LKPD Kota Pekanbaru dengan penyajian Tabel I.2 sebagai berikut Tabel I.1 Opini yang diperoleh OPD Kota Pekanbaru No Tahun Opini 1.

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 ...

terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara : a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya; b. menerbitkan laporan ...

#### UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA ...

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan ... Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan ...

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 ...

Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Pasal 4 ... Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### **ISSN 1412-7288 teropong - MaPPI FHUI**

Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2000); dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011. Choky R. Ramadhan, menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), Depok, dan Master of Law (LL.M) dalam Asian and Comparative Law di University of Washington – Seattle, WA.

#### **EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS ...**

negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa, UNTAN diberi tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan pendidikan yang mampu ... kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka kualitas LAKIP ditentukan oleh penilaian hasil evaluasi yang dilakukan oleh ...

*BKN Minta PPK Instansi Validasi Ulang Data 152.803 Non-ASN ...*

4008 Badan Pemeriksa Keuangan ... 4018 Arsip Nasional Republik Indonesia 4020 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 4023 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 4024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 4025 Perpustakaan Nasional RI

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ... Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas ...

**REKONSTRUKSI SISTEM FISKAL NASIONAL DALAM BINGKAI ...**

Disamping kedua pasal tersebut, juga mencakup Pasal 23 yang berkaitan dengan keuangan negara, budget atau anggaran, perpajakan, pemeriksaan keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan bahkan mengenai perbankan (bank sentral). Dalam naskah UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 2009, Pasal 23 UUD 1945 terdiri atas 5 ayat, yaitu (1) Anggaran

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...**

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ... Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas ...

*BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran ...*

pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

#### *DAFTAR PUSTAKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

#### BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memasuki pembangunan ekonomi jangka panjang, yang ... Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa . 2 barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang ... penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang kepabaeanan.

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 ...

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas ...